

**PENGARUH MEKANISME *CORPORATE GOVERNANCE* DAN STRUKTUR
KEPEMILIKAN PUBLIK TERHADAP LUAS PENGUNGKAPAN *ENTERPRISE RISK
MANAGEMENT***
(Studi Empiris Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan Bursa
Malaysia tahun 2015-2017)

¹ **Barbara Gunawan**
(barbaragunawan@yahoo.co.id)

² **Primastuti Yuniar Permatasari**
(primayuniar97@gmail.com)

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Abstract

This study aims to examine the effect of corporate governance mechanisms and the structure of public ownership on the broad disclosure of enterprise risk management in manufacturing companies in Indonesia and Malaysia. The sample in this study were manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange and Malaysia Stock Exchange in the period 2015 - 2017. This study uses secondary data. Data collection techniques used purposive sampling method and obtained 183 samples in Indonesia and 180 samples in Malaysia. This research use SPSS version 15.0 as data analysis tool. The results of the analysis obtained indicate that the Independent Commissioner, the reputation of the auditor, and the size of the company have a positive effect on the broad disclosure of enterprise risk management. While the number of members of the board of commissioners and the structure of public ownership negatively affected the broad adoption of enterprise risk management in Indonesian manufacturing companies. the results of the analysis of Independent Commissioners, the number of members of the board of commissioners, and the reputation of the auditor have a positive effect on the broad disclosure of enterprise risk management. While the size of the company and the structure of public ownership negatively affect the Broad Disclosure of Enterprise Risk Management in manufacturing companies in Malaysia.

Keywords: *Structure of Corporate Governance, Public Ownership
Structure, Enterprise Risk Management*

PENDAHULUAN

Pada tahun 2017 muncul isu *fraud* akuntansi di British Telecom. Sebagaimana skandal akuntansi lainnya, kasus *fraud* tersebut berdampak negatif kepada akutan publiknya. *Price Waterhouse Coopers* (PwC) merupakan kantor akuntan publik di dunia dan termasuk dalam *the bigfour* juga terkena dampak dalam isu *fraud* yang terjadi. Modus yang terjadi dalam *fraud* yaitu membesarkan penghasilan perusahaan melalui perpanjangan kontrak palsu dan *invoice*-nya serta transaksi palsu pada vendor.

Dampak lain *fraud* akuntansi penggelembungan laba ini menyebabkan Britis Telecom harus menurunkan GBP 530 juta dan mendorong proyeksi arus kas sebesar GBP 500 juta untuk membayar hutang yang tidak dilaporkan. British Telecom telah rugi membayar pajak penghasilan atas laba yang tidak sebenarnya. Skandal akuntansi ini juga menyebabkan kerugian pada pemegang saham dan investor dimana harga saham British Telecom anjlok ketika British Telecom mengumumkan koreksi pendapatan sebesar GBP 530 juta di bulan Januari. *Fraud* atau kecurangan tidak hanya terjadi di perusahaan kecil saja, melainkan banyak terjadi di perusahaan besar yang

maju korporasi ternama dan negara berkembang. Ini artinya *fraud* dianggap sebagai ancaman atau risiko yang terdapat di setiap organisasi.

Indonesia salah satu negara ASEAN yang menarik banyak pelaku usaha asing untuk membangun usahanya dikarenakan potensi pasarnya lebih besar. Negara lain contohnya Malaysia merupakan negara yang memiliki perekonomian yang baik di bidang industri.

Pada era ekonomi global saat ini terjadi persaingan bisnis yang cukup ketat, banyak perusahaan dihadapkan pada kondisi yang lebih transparan dalam pengungkapan informasi laporan keuangan yang terdapat di perusahaan, terlebih pada perusahaan *go public* di pasar modal. Dengan menerapkan sistem *go public* perusahaan bisa memperbaiki citra dengan mengedepankan tata kelola perusahaan dengan sistem transparan atau *Good Corporate Governance* (GCG).

Risiko juga berkaitan dengan keberhasilan dan kegagalan, sistem manajemen risiko yang baik merupakan suatu kekuatan bagi perusahaan dalam membantu pencapaian tujuan bisnis perusahaan dan peningkatan kualitas pengungkapan dan pelaporan keuangan sebagai usaha perlindungan reputasi perusahaan (Ardiansyah dan Adnan, 2014). Pengungkapan informasi yang transparan tersebut membuat beberapa pihak yang berkepentingan contohnya investor, kreditor, maupun pengguna informasi lainnya dapat terbantu dapat pengambilan keputusan dan kesiapan dalam menghadapi era perekonomian yang semakin berkembang saat ini. Salah satu pemegang saham dalam sebuah perusahaan yaitu publik atau masyarakat pada umumnya yang memiliki pengaruh cukup besar terhadap perusahaan.

Struktur kepemilikan publik yaitu suatu perusahaan yang menyediakan pengungkapan informasi yang memadai sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas (Fathimiyah, dkk 2012). Hal tersebut disebabkan oleh semakin besar saham yang dimiliki masyarakat maka pihak yang membutuhkan transparansi mengenai laporan keuangan semakin banyak. Sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap investor perusahaan akan dituntut untuk memberikan laporan informasi secara terbuka dan secara transparan. Oleh sebab itu laporan keuangan yang dikelola sendiri menjadikan banyak batasan dan tidak bisa dimanipulasi (Kanhai dan L, 2014).

Perkembangan teknologi di ASEAN saat ini mengalami persaingan bisnis di berbagai perusahaan. Dengan adanya persaingan bisnis yang sangat ketat ini, membuat setiap perusahaan berlomba-lomba untuk memberi nilai tambah kepada *stakeholder*, hal ini suatu pencapaian perusahaan. Dengan pencapaian tersebut perusahaan akan dihadapkan dengan ketidakpastian.

Ketidakpastian adalah suatu hal yang tidak bisa kita hindari dalam dunia bisnis. Kegiatan investasi juga merupakan kegiatan di dalam bisnis yang membutuhkan informasi yang relevan dan satu kegiatan bisnis yang mengandung risiko dan ketidakpastian. Situasi ketidakpastian lingkungan dan persaingan kompetitif, perusahaan menghadapi berbagai risiko dalam mempertahankan dan meningkatkan kinerja mereka sendiri. Untuk meminimalisir kerugian yang disebabkan oleh risiko, perusahaan harus dikelola dengan baik dan bijak dalam menggunakan manajemen risiko. Kegagalan dalam manajemen risiko akan menyebabkan kerugian dalam perusahaan, secara langsung maupun tidak langsung, sebagai konsekuensi dari kegiatan bisnis yang menimbulkan risiko (Halim, *et. all*, 2017).

Pengungkapan *Enterprise Risk Management* (ERM) salah satu cara perusahaan *go publik* yang dapat membantu publik untuk percaya pada keakuratan pelaporan keuangan dan meminimalisir pihak yang tidak bertanggungjawab dalam penyalahgunaan laporan keuangan (Handayani dan Yanto, 2013). Pada dasarnya ERM menuntut adanya sistem transparan dan keterbukaan dalam pelaporan keuangan yang mengacu pada manajemen risiko. Selain itu pengungkapan ERM sudah diterapkan sebagian di negara Asia Tenggara. Contoh dari beberapa negara yang sudah menerapkan ERM dalam mengelola risiko adalah Indonesia dan Malaysia. Keduanya merupakan sebagian dari beberapa negara yang merupakan bagian dari ASEAN. Dengan menerapkan ERM dengan baik, maka manajemen risiko dapat membuat langkah untuk kesuksesan di masa depan perusahaannya. Oleh karena itu mekanisme *corporate governance* seharusnya dapat dilihat dari tingkat transparansi dalam menyampaikan segala bentuk laporan. Laporan untuk pihak internal maupun eksternal perusahaan.

Perkembangan ERM, khususnya di negara Indonesia dan Malaysia sudah mulai berjalan dan berkembang dengan baik. Sebagian contoh berkembang ERM di Indonesia pada tahun 2016, PT Pertamina EP sebagai anak buah dari PT. Pertamina (Persero) dan kontraktor

kontrak kerja sama di bawah naungan SKKMigas menjuarai ajang *Asean Risk Management* 2016 yang diikuti oleh 23 perusahaan di kawasan ASEAN. Ajang *Asean Risk Management* 2016 yang diadakan oleh *Enterprise Risk Management Academy* melakukan penilaian kepada perusahaan di wilayah ASEAN terkait bagaimana pengelolaan faktor risiko di dalam perusahaan.

Selain itu di Indonesia, setelah dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia No8/4/PBI/2006 yang membahas tentang penerapan GCG bagi Bank Umum dengan pembentukan Komite Pemantauan Risiko. Pembentukan Komite Pemantauan Risiko merupakan salah satu persyaratan yang harus dilengkapi oleh bank umum. Bagi bank yang belum membentuk komite pemantauan risiko akan dihadapkan dengan sanksi dari Bank Indonesia. *The Committee of Sponsoring of the Tread way Commission* (COSO) mulai memperkenalkan ERM dan dipublikasi sejak tahun 2004. COSO mengemukakan bahwa ERM mampu memberikan konsep dan prinsip utama, pedoman dan arahan yang jelas. Bahkan lebih lanjut diharapkan mampu diterima secara meluas oleh berbagai perusahaan dan organisasi lainnya, *stakeholder* dan berbagai pihak yang berkepentingan. ERM juga sudah berkembang secara baik di berbagai negara di ASEAN, selain Indonesia negara Malaysia sudah menerapkan sistem ERM dalam sistem operasional di dalam perusahaannya.

KAJIAN LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Enterprise Risk Management

Enterprise Risk Management merupakan pendekatan manajemen risiko yang mempertimbangkan risiko dalam hal strategi bisnis dan mengelola hal tersebut dengan portofolio yang berfokus pada risiko kritis, pertanggung jawaban risiko yang ditetapkan, dan risiko yang kuat pemantaunya. Berdasarkan ERM *framework* yang dikeluarkan COSO 2004, dalam 108 item mengenai pengungkapan ERM terdapat 8 dimensi yang memengaruhi ERM yaitu Lingkungan internal; Penempatan tujuan; Identifikasi kejadian; Penilaian risiko; Respond atas risiko; Kegiatan pengawasan; Informasi dan komunikasi; dan Pemantauan (Meizaroh dan Lucyanda, 2011).

Perhitungan item-item yang digunakan menggunakan pendekatan dikotomi. Pendekatan dikotomi adalah item ERM yang diungkapkan diberi nilai 1, dan perhitungan tidak diungkapkan diberi nilai 0. Setiap item akan dijumlahkan guna memperoleh keseluruhan indeks ERM masing-masing perusahaan. Pada penelitian ini cara menghitung indeks pengungkapan ERM dinyatakan sebagai berikut:

$$ERM = \frac{\text{Jumlah Item yang Diungkapkan}}{108}$$

Komisaris independen

Variabel komisaris independen dengan diproksikan dengan komisaris independen. Proporsi komisaris independen mencerminkan kadar objektivitas dan independensi dari keseluruhan dewan komisaris dalam aktivitas pengambilan keputusan (Wulandari, 2018). Dalam penelitian ini komisaris independensi dirumuskan sebagai berikut:

$$KI = \frac{\text{jumlah dalam anggota komisaris independen}}{\text{jumlah total dalam anggota dewan komisaris}}$$

Ukuran dewan komisaris

Dewan komisaris merupakan suatu mekanisme yang bertugas untuk mengawasi dan memberikan arahan pada pengelola perusahaan. Ukuran dewan komisaris diukur dengan menjumlahkan total anggota dewan komisaris yang terdapat di perusahaan.

Reputasi auditor

Reputasi auditor menunjukkan bagaimana perusahaan dengan bijak dan baik dalam menggunakan KAP sebagai auditor eksternal nya. Reputasi auditor dapat diukur menggunakan variabel dummy apabila perusahaan menggunakan KAP *big four* diberi nilai 1 dan jika tidak menggunakan diberi nilai 0.

Ukuran perusahaan

Ukuran perusahaan dapat digambarkan dengan besar kecilnya perusahaan tersebut. Ukuran perusahaan banyaknya jumlah aset yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Penelitian ini mengukur total aset yang dimiliki perusahaan (Ardiansyah dan Adnan, 2014). Rumus dalam menghitung ukuran perusahaan sebagai berikut:

$$\text{Ukuran Perusahaan} = LN (\text{total aset})$$

Struktur kepemilikan publik

Struktur kepemilikan publik merupakan jumlah komposisi yang setara yang berasal dari pihak internal maupun eksternal yang bersama dalam memajukan perusahaan (Ardiansyah dan Adnan, 2014). Struktur internal dimaksudkan adalah manajerial perusahaan, sedangkan struktur eksternal adalah kepemilikan investor, masyarakat (publik) dan sebagainya. Oleh sebab itu perusahaan yang tingkat kepemilikan publiknya lebih tinggi akan lebih cenderung tepat waktu dalam menyampaikan laporan keuangannya. Rumus yang dipergunakan dalam menjumlahkan struktur kepemilikan publik sebagai berikut:

$$KK = \frac{\text{saham yang dimiliki oleh publik}}{\text{total saham}}$$

HASIL PENELITIAN TERDAHULU DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Komisaris Independen dan Luas Pengungkapan ERM

Dewan komisaris salah satu yang memegang peranan terpenting bagi perusahaan, terutama dalam pelaksanaan *Good Corporate Governance*. Jumlah anggota dewan yang lebih besar akan memberikan manfaat untuk bertugas mengawasi dewan direksi dan membentuk komite dengan keterampilan yang diperlukan. Dewan komisaris dapat membentuk koordinasi yang dapat mengurangi risiko (Ardiansyah dan Adnan, 2014).

Tujuan dewan komisaris independen yaitu untuk mendorong suatu keadaan yang lebih baik dan menaruh keseimbangan diantara para kepentingan perusahaan dengan kepentingan *stakeholder*.

Handayani dan Yanto (2013) menemukan bahwa komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap luas pengungkapan ERM. Hasil penelitian berbeda dengan penelitian yang dilakukan Agista, dkk (2017) menunjukkan bahwa komisaris independen tidak memiliki pengaruh terhadap luas pengungkapan ERM. Berdasarkan alasan dan hasil penelitian tersebut, maka hipotesis yang diajukan:

H_{1a}: Komisaris Independen berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan ERM di Indonesia.

H_{1b}: Komisaris Independen berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan ERM di Malaysia.

Jumlah Anggota Dewan Komisaris dan Luas Pengungkapan ERM

Dewan komisaris mempunyai tugas untuk melakukan monitoring dan mengevaluasi seluruh pelaksanaan aturan perusahaan yang dibuat oleh perusahaan serta memberikan nasihat kepada dewan direksi. Dewan komisaris perusahaan minimal berjumlah dua orang. Pemberhentian maupun pengangkatan jabatan dewan komisaris dilakukan melalui rapat umum pemegang saham, dan tidak boleh diputuskan secara sepihak. Oleh sebab itu, dapat memudahkan dewan komisaris untuk bekerja sama dengan komite manajemen risiko yang telah dibuat.

Semakin banyak jumlah anggota dewan komisaris maka dapat memengaruhi manajer dalam menjalankan tugasnya dengan baik (Meizaroh dan Lucyanda, 2011). Sejalan dengan penelitian yang dilakukan Ardiansyah dan Adnan, (2014) menemukan bahwa jumlah

anggota komisaris memiliki pengaruh terhadap luas pengungkapan ERM. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan Dzakawali, dkk (2017) menunjukkan bahwa jumlah anggota dewan tidak berpengaruh terhadap luas pengungkapan ERM. Berdasarkan penjelasan diatas, maka hipotesis yang diajukan adalah:

H_{2a}: Jumlah Anggota Dewan Komisaris berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan ERM di Indoensia.

H_{2b}: Jumlah Anggota Dewan Komisaris berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan ERM di Malaysia.

Reputasi Auditor dan Luas Pengungkapan ERM

Reputasi auditor merupakan istilah auditor yang memiliki nama baik, kepercayaan publik, serta memiliki prestasi atas jasa yang telah diberikan. *Big four* yang merupakan proksi dari reputasi auditor dikarenakan *Big four* dapat melihat dan memiliki kekuatan dalam melakukan analisis manajemen agar bisa memberikan kualitas penilaian dan pengawasan risiko dalam sebuah perusahaan (Ardiansyah dan Adnan, 2014). Kantor Akuntan Publik (KAP) yang tergolong dalam *Big four* adalah KAP yang mempunyai reputasi dengan kualitas audit yang terpercaya. Meizaroh dan Lucyanda (2011) menjelaskan jika *Big four* dapat memberikan panduan akan praktik *Good Corporate Governance* dan dapat membantu internal auditor dalam meningkatkan efektifitas. Dalam penelitian Handayani dan Yanto (2013) menemukan bahwa *Big four* memiliki pengaruh positif terhadap ERM. Sehingga hipotesis yang diajukan adalah:

H_{3a}: Reputasi Auditor berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan ERM di Indonesia.

H_{3b}: Reputasi Auditor berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan ERM di Malaysia.

Ukuran Perusahaan dan Luas Pengungkapan ERM

Besar kecilnya perusahaan itu menunjukkan adanya ukuran di dalam perusahaan tersebut. Firdaus, dkk (2014) menjelaskan ukuran perusahaan dibagi menjadi 3 kategori yaitu perusahaan besar, perusahaan menengah, dan perusahaan kecil. Pada dasarnya semakin besar perusahaan maka semakin besar risiko yang akan dihadapi ke depannya. Perusahaan yang sudah berkembang biasanya menerapkan konsep GCG yang lebih bagus dibandingkan dengan perusahaan yang lain (Ardiansyah dan Adnan, 2014).

Oleh sebab itu perusahaan yang sudah berkembang atau perusahaan yang cukup besar akan mendapatkan dorongan yang kuat dalam mengungkapkan pelaporan keuangan. Hal ini sejalan dengan penelitian Handayani dan Yanto (2013) bahwa perusahaan dengan ukuran besar memiliki kegiatan yang lebih terstruktur oleh sebab itu dapat menyebabkan pengungkapan informasi yang lebih baik untuk menunjukkan pertanggungjawaban perusahaan kepada publik. Sehingga hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

H_{4a}: Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan ERM di Indonesia.

H_{4b}: Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan ERM di Malaysia.

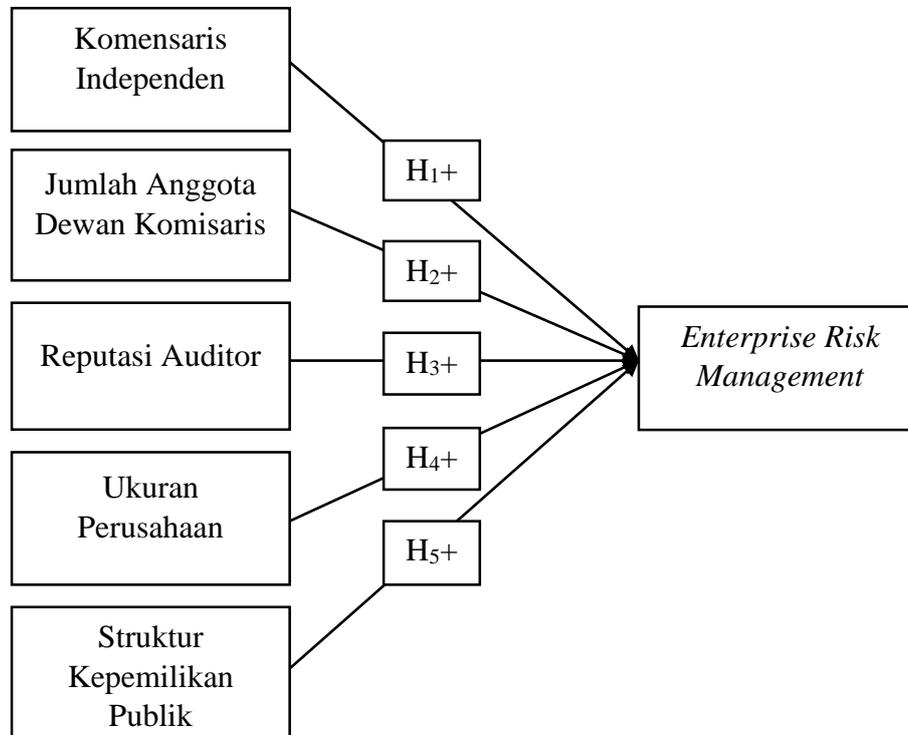
Struktur Kepemilikan Publik dan Luas Pengungkapan ERM

Struktur kepemilikan dapat digolongkan menjadi dua bagian yaitu kepemilikan eksternal dan kepemilikan internal atau kepemilikan manajerial (Ardiansyah dan Adnan, 2014). Apabila pihak eksternal lebih banyak memegang saham maka perusahaan akan dituntut untuk memberikan pengungkapan laporan yang luas dan transparan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada investor (Prayoga dan Almilia, 2013). Sementara menurut Handayani dan Yanto (2013) kepemilikan manajerial dan kepemilikan publik sendiri termasuk dalam mekanisme dari *corporate governance* yang paling berpengaruh dalam meminimalkan masalah dalam keagenan. Sehingga hipotesis yang diajukan dalam penelitian adalah:

H_{5a}: Struktur kepemilikan berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan ERM di Indonesia.

H_{5b}: Struktur kepemilikan berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan ERM di Malaysia.

MODEL PENELITIAN



METODE PENELITIAN

Objek Penelitian

Objek pada penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (IDX) dan Bursa Malaysia (BM) pada tahun 2015 - 2017. Periode tersebut dipilih guna untuk menggambarkan kondisi terbaru saat ini pada suatu perusahaan. Alasan peneliti menggunakan perusahaan manufaktur dikarenakan sektor tersebut termasuk di dalam sektor yang memperkuat perekonomian di negara berkembang seperti Indonesia dan Malaysia.

Jenis Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diambil dari *annual report* semua perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan Bursa Malaysia.

Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling* yaitu sampel yang diambil berdasarkan informasi yang ada sesuai dengan kriteria yang ditentukan. Kriteria yang digunakan dalam penentuan sampel pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan Bursa Malaysia yang mempublikasi laporan keuangan dan annual report secara berturut-turut pada periode 2015-2017.
2. Perusahaan manufaktur yang telah mengungkapkan manajemen resiko dalam laporan tahunan secara berkala selama periode penelitian.
3. Perusahaan manufaktur yang memiliki data yang dibutuhkan selama periode penelitian yaitu 2015-2017.

Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data penelitian ini dengan melakukan penelusuran data sekunder, kemudian dilanjutkan dengan pencatatan dan perhitungan. Penelusuran data sekunder melalui studi pustaka, yaitu dengan tinjauan literatur, jurnal, artikel, maupun media tertulis lainnya yang masih berkaitan dengan topik pembahasan di dalam penelitian.

METODE ANALISIS

1. Pengujian asumsi klasik

a. Uji Normalitas

Dalam penelitian ini menggunakan *Kolmogorov-Smirnow Test*, data dikatakan normal apabila nilai *Kolmogorov-Smirnow Test* > 0,05.

b. Uji Multikolinieritas

Dalam penelitian ini dilihat nilai *tollerance* dan VIF

c. Uji Autokolerasi

Dalam penelitian ini dilihat dengan uji *Durbin Watson*

d. Uji Heterokedasitas

Data dikatakan bebas dari heteroskedasitas apabila nilai signifikansinya yaitu < alpha 0,05 atau 5%.

2. Pengujian regresi berganda

Uji hipotesis pada penelitian ini menggunakan regresi berganda (*Multiple Regression*), dikarenakan variabel independen dalam penelitian ini lebih dari satu variabel. Persamaan regresinya dirumuskan sebagai berikut:

$$ERM = \alpha + \beta_1 KI + \beta_2 UKR_DWN + \beta_3 RE_AU + \beta_4 UK_PE + \beta_5 KEP_PBLK + e$$

Dimana:

ERM : Enterprise Risk Management

α : konstanta

$\beta_1 - \beta_5$: Koefisien variabel

KI : Komisaris Independen

UKR_DWN : Ukuran Dewan Komisaris

RE_AU : Reputasi Auditor

UK_PE : Ukuran Perusahaan

KEP_PBLK : Struktur Kepemilikan Publik

e : *Error Term*

HASIL DAN PEMBAHASAN

Objek yang digunakan dalam penelitian ini yaitu seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Bursa Malaysia (BM) dengan periode penelitian tahun 2015 sampai dengan 2017. Data yang digunakan merupakan data sekunder, yaitu laporan keuangan tahunan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Bursa Malaysia (BM). Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan metode *purposive sampling*. Adapun prosedur pemilihan sampel disajikan dalam Tabel 1.

TABEL 1
Prosedur Pemilihan Sampel di Indonesia dan Malaysia

No	Keterangan	Indonesia	Malaysia
1	Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI dan menerbitkan <i>annual report</i> tahun 2015-2017	127 perusahaan	130 perusahaan
2	Perusahaan yang tidak mengungkapkan ERM dan GCG	(35 perusahaan)	(40 perusahaan)
3	Perusahaan yang tidak mengungkapkan ERM dan GCG	(31 perusahaan)	(30 perusahaan)
4	Total perusahaan yang dijadikan sampel	61 perusahaan	60 perusahaan
	Jumlah data	183 perusahaan	180 perusahaan

Uji Kualitas Instrumen dan Data

Analisis Stastik Deskriptif.

TABEL 2
Statistik Deskriptif Indonesia.

	N	Min	Max	Mean	Std. Deviation
Komensaris Independen (KI)	183	11.11	75.00	40.6154	12.25189
Jumlah Anggota Dewan Komisaris (UKR_DWN)	183	2.00	9.00	4.2240	1.68349
Reputasi Auditor (RE_AU)	183	.00	1.00	.4153	.49413
Ukuran Perusahaan (UK_PE)	183	21.02	32.15	28.0026	1.77124
Struktur Kepemilikan Publik (KEP_PBLK)	183	.00	1.00	.2538	.19752
Enterprise Risk Management	183	.37	.64	.5085	.05841
Valid N (listwise)	183				

Sumber: Hasil Output SPSS, 2018

TABEL 3
Statistik Deskriptif Malaysia.

	N	Min	Max	Mean	Std. Deviation
Komensaris Independen (KI)	180	16.67	71.43	44.2231	12.48670
Jumlah Anggota Dewan Komisaris (UKR_DWN)	180	4	13	7.32	1.713
Reputasi Auditor (RE_AU)	180	0	1	.57	.496
Ukuran Perusahaan (UK_PE)	180	17.01	22.30	19.8204	.99039
Struktur Kepemilikan Publik (KEP_PBLK)	180	.06	1.29	.4287	.20960
Enterprise Risk Management	180	.63	.91	.7647	.05582
Valid N (listwise)	180				

Sumber: Hasil Output SPSS, 2018

Analisis Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

TABEL 4
Uji Normalitas Data Indonesia
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		183
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.11878460
Most Extreme Differences	Absolute	.065
	Positive	.050
	Negative	-.065
Kolmogorov-Smirnov Z		.875
Asymp. Sig. (2-tailed)		.428

Sumber: Hasil Output SPSS, 2018

Berdasarkan Tabel 4 didapatkan hasil bahwa nilai *Asymp. Sig (2-tailed)* data Indonesia sebesar $0,428 > (0,05)$. Jadi, dapat disimpulkan data pada penelitian dengan menggunakan *sample* dari perusahaan manufaktur berdistribusi normal.

TABEL 5
Uji Normalitas Data Malaysia
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		180
Normal	Mean	.0000000
Parameters ^{a,b}	Std. Deviation	.07431688
Most Extreme Differences	Absolute	.056
	Positive	.036
	Negative	-.056
Kolmogorov-Smirnov Z		.749
Asymp. Sig. (2-tailed)		.629

Sumber: Hasil Output SPSS, 2018

Berdasarkan Tabel 5 didapatkan hasil bahwa nilai *Asymp. Sig (2-tailed)* data Malaysia sebesar $0,629 > (0,05)$. Jadi, dapat disimpulkan data pada penelitian dengan menggunakan *sample* dari perusahaan manufaktur berdistribusi normal.

Uji Autokorelasi

TABEL 6
Uji Autokolerasi data Indonesia

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.293 ^a	.086	.060	.12045	1.832

Sumber: Hasil Output SPSS, 2018

Berdasarkan Tabel 6 menunjukkan tidak adanya autokorelasi. Jadi, dapat disimpulkan data pada penelitian dengan *sample* dari perusahaan manufaktur di Indonesia tidak terjadi autokolerasi.

TABEL 7
Uji Autokolerasi data Malaysia

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.358 ^a	.128	.103	.07538	1.827

Sumber: Hasil Output SPSS, 2018

Berdasarkan Tabel 7 menunjukkan tidak adanya autokorelasi. Jadi, dapat disimpulkan data pada penelitian dengan *sample* dari perusahaan manufaktur di Malaysia tidak terjadi autokolerasi.

Uji Multikolinieritas

TABEL 4. 8
Uji Multikolinieritas Data Indonesia

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
(Constant)		
Komensaris Independen	.947	1.056
Jumlah Anggota Dewan Komisaris	.799	1.251
Reputasi Auditor	.898	1.113
Ukuran Perusahaan	.860	1.162
Struktur Kepemilikan Publik	.981	1.020

Sumber: Hasil Output SPSS, 2018

Berdasarkan tabel 8 menunjukkan nilai *tolerance* semua variabel independen diatas variabel komensaris independen 0,947; variabel jumlah anggota dewan komisaris 0,799; variabel reputasi auditor 0,898; variabel ukuran perusahaan 0,860; dan variabel struktur kepemilikan publik 0,981. Semua variabel independen diatas 10% atau diatas 0,01 dan nilai *variance inflation factor* (VIF) semua variabel independen kurang dari 10. Hal ini menunjukkan bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini tidak terjadi multikolinieritas.

TABEL 9
Uji Multikolinieritas Data Malaysia

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
(Constant)		
Komensaris Independen	.948	1.055
Jumlah Anggota Dewan Komisaris	.915	1.093
Reputasi Auditor	.942	1.061
Ukuran Perusahaan	.903	1.107
Struktur Kepemilikan Publik	.960	1.042

Sumber: Hasil Output SPSS, 2018

Berdasarkan tabel 9 menunjukkan nilai *tolerance* semua variabel independen diatas variabel komensaris independen 0,948; variabel jumlah anggota dewan komisaris 0,915; variabel reputasi auditor 0,942; variabel ukuran perusahaan 0,903; dan variabel struktur kepemilikan publik 0,960. Semua variabel independen diatas 10% atau diatas 0,01 dan nilai *variance inflation factor* (VIF) semua variabel independen kurang dari 10. Hal ini menunjukkan bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini tidak terjadi multikolinieritas.

Uji Heteroskedastisitas

TABEL 10
Uji Heteroskedastisitas Data Indonesia

Model	Sig.
	(Constant) .572
	Komensaris Independen .101
	Jumlah Anggota Dewan .381
1	Komisaris
	Reputasi Auditor .233
	Ukuran Perusahaan .544
	Struktur Kepemilikan Publik .899

Sumber: Hasil Output SPSS, 2018

Berdasarkan Tabel 10 didapatkan hasil bahwa nilai signifikansi dari masing-masing variabel independen pada penelitian ini lebih besar (0,05). Komisaris Independen (KI) sebesar 0,572; Jumlah Anggota Dewan Komisaris (UKR_DWN) sebesar 0,101; Reputasi Auditor (RE_AU) sebesar 0,381; Ukuran Perusahaan (UK_PE) sebesar 0,233; dan Struktur Kepemilikan Publik (KEP_PBLK) sebesar 0,899. Jadi, dapat disimpulkan data pada penelitian ini tidak terjadi heteroskedastisitas.

TABEL 11
Uji Heteroskedastisitas Data Malaysia

Model	Sig.
	(Constant) .211
	Komensaris Independen .149
	Jumlah Anggota Dewan .090
1	Komisaris
	Reputasi Auditor .656
	Ukuran Perusahaan .124
	Struktur Kepemilikan Publik .519

Sumber: Hasil Output SPSS, 2018

Berdasarkan Tabel 11 didapatkan hasil bahwa nilai signifikansi dari masing-masing variabel independen pada penelitian ini lebih besar (0,05). Komisaris Independen (KI) sebesar 0,149; Jumlah Anggota Dewan Komisaris (UKR_DWN) sebesar 0,090; Reputasi Auditor (RE_AU) sebesar 0,656; Ukuran Perusahaan (UK_PE) sebesar 0,124; dan Struktur Kepemilikan Publik (KEP_PBLK) sebesar 0,519. Jadi, dapat disimpulkan data pada penelitian ini tidak terjadi heteroskedastisitas.

Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda. Metode analisis regresi berganda ini digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel-variabel independen terhadap variabel dependen dengan menggunakan program SPSS.

Pengujian hipotesis ini meliputi tiga bagian yaitu nilai koefisien determinasi (*Adjusted R₂*), nilai statistik F dan nilai statistik *t*.

Uji Koefisien Determinasi (*Adjusted R₂*)

TABEL 12
Uji Koefisien Determinasi (*Adjusted R₂*) Data Indonesia

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.293 ^a	.086	.060	.12045

Sumber: Hasil Output SPSS, 2018

Berdasarkan Tabel 12 didapatkan hasil bahwa besarnya koefisien determinasi (*Adjusted R₂*) adalah 0,060 atau 6%. Hal ini menunjukkan bahwa Luas Pengungkapan *Enterprise Risk Management* di Indonesia sebesar 6% yang dapat dijelaskan oleh variabel Komisaris Independen (KI), Jumlah Anggota Dewan Komisaris (UKR_DWN), Reputasi Auditor (RE_AU), Ukuran Perusahaan (UK_PE) dan Struktur Kepemilikan Publik (KEP_PBLK). Sisanya 94% (100%-6%) dipengaruhi oleh variabel lain diluar model penelitian.

TABEL 13
Uji Koefisien Determinasi (*Adjusted R₂*) Data Malaysia

Sumber: Hasil Output SPSS, 2018	Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
	1	.358 ^a	.128	.103	.07538

Berdasarkan Tabel 13 didapatkan hasil bahwa besarnya koefisien determinasi (*Adjusted R₂*) adalah 0,103 atau 10,3%. Hal ini menunjukkan bahwa Luas Pengungkapan *Enterprise Risk Management* di Malaysia sebesar 10,3% yang dapat dijelaskan oleh variabel Komisaris Independen (KI), Jumlah Anggota Dewan Komisaris (UKR_DWN), Reputasi Auditor (RE_AU), Ukuran Perusahaan (UK_PE) dan Struktur Kepemilikan Publik (KEP_PBLK). Sisanya 89,7% (100%-10,3%) dipengaruhi oleh variabel lain diluar model penelitian.

Uji signifikan simultan (Uji F)

TABEL 14
Uji Signifikan Simultan (Uji F) Data Indonesia

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.242	5	.048	3.336	.007 ^b
	Residual	2.568	177	.015		
	Total	2.810	182			

Sumber: Hasil Output SPSS, 2018

Berdasarkan Tabel 14 didapatkan hasil bahwa nilai F sebesar 3,336 dengan nilai signifikan F sebesar $0,007 < (0,05)$. Jadi, variabel independen (komisaris independen, jumlah

anggota dewan komisaris, reputasi auditor, ukuran perusahaan dan struktur kepemilikan publik) berpengaruh simultan atau bersama-sama terhadap variabel dependen (ERM).

TABEL 4. 15
Uji Signifikan Simultan (Uji F) Data Malaysia

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	.145	5	.029	5.102	.000 ^b
Residual	.989	174	.006		
Total	1.134	179			

Sumber: Hasil Output SPSS, 2018

Berdasarkan Tabel 15 didapatkan hasil bahwa nilai F sebesar 5.102 dengan nilai signifikan F sebesar $0,000 < (0,05)$. Jadi, variabel independen (komisaris independen, jumlah anggota dewan komisaris, reputasi auditor, ukuran perusahaan dan struktur kepemilikan publik) berpengaruh simultan atau bersama-sama terhadap variabel dependen (ERM).

Uji Nilai t

TABEL 16
Uji Nilai t Data Indonesia

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	.057	.495		.115	.908
Komensaris Independen	-.057	.030	-.141	-1.912	.057
Jumlah Anggota Dewan Komisaris	.057	.026	.172	2.143	.033
Reputasi Auditor	-.022	.024	-.068	-.900	.369
Ukuran Perusahaan	-.193	.147	-.102	-1.310	.192
Struktur Kepemilikan Publik	.149	.054	.201	2.776	.006

Sumber: Hasil Output SPSS, 2018

Hasil analisis regresi berganda yang ditunjukkan pada tabel 4.16 diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$ERM = 0,057 + 0,057 (KI) + 0,057 (UKR_DWN) + 0,022 (RE_AU) + 0,193 (UK_PE) + 0,149 (KEP_PBLK) + e$$

TABEL 17
Uji Nilai t Data Malaysia

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
	B	Std. Error			
(Constant)	-.339	.369		-.919	.359
Komisaris Independen	.045	.019	.173	2.382	.018
Jumlah Anggota Dewan	.075	.026	.209	2.827	.005
1 Reputasi Auditor	.042	.015	.209	2.868	.005
Ukuran Perusahaan	-.087	.119	-.054	-.730	.466
Struktur Kepemilikan Publik	-.002	.010	-.014	-.193	.847

Sumber: Hasil Output SPSS, 2018

$$\text{ERM} = -0,339 + 0,045 (\text{KI}) + 0,075 (\text{UKR_DWN}) + 0,042 (\text{RE_AU}) + 0,087 (\text{UK_PE}) + 0,002 (\text{KEP_PBLK}) + e$$

Hasil pengujian terhadap hipotesis- hipotesis yang diteliti:

a. Pengaruh Komisaris Independen terhadap Enterprise Risk Management.

Berdasarkan Tabel 16 menunjukkan data dari Indonesia bahwa komisaris independen memiliki nilai koefisien regresi sebesar -0,057 dengan nilai signifikansi sebesar $0,057 > \alpha (0,05)$. Artinya variabel komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap luas pengungkapan *Enterprise risk management*. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis satu (H1_a) **ditolak**.

Hal ini mendasari hipotesis ini ditolak mungkin disebabkan karena kualitas fungsi pengawasan bukan ditentukan oleh tingkat independensi tetapi lebih ditentukan oleh kualitas dan latar belakang pendidikan anggota dewan komisaris. Pengangkatan komisaris independen dilakukan untuk memenuhi regulasi semata, tidak untuk melaksanakan *good corporate governance* (Meisaroh dan Lucyanda, 2011).

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Dionne dan Thouraya (2004), Andarini dan Indira (2010) dan Meisaroh dan Lucyanda (2011) yang menunjukkan kehadiran komisaris independen tidak berpengaruh pada tingkat adopsi ERM.

Jika dilihat dari data yang terdapat di negara Malaysia bahwa berdasarkan tabel 17 menunjukkan komisaris independen memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,045 dengan nilai signifikansi sebesar $0,018 > \alpha (0,05)$. Artinya variabel komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap luas pengungkapan *Enterprise risk management*. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis satu (H1_b) **diterima**.

Hasil dan interpretasi ini didukung dengan argumentasi bahwa fungsi pengawasan dewan komisaris yang baik tidak hanya berdasarkan pada kuantitas dari komisaris independen dalam suatu perusahaan, namun lebih ditentukan oleh pengalaman, kompetensi dan komitmen dalam menerapkan dan mengungkapkan ERM, serta spesialisasi yang sesuai dengan bidang perusahaan sehingga menunjang dewan komisaris untuk lebih memahami profil risiko sesuai dengan bidang perusahaan (Utami, 2015). Argumentasi ini diperkuat dengan bukti empiris dari penelitian Nuryaman dan Rusmini

(2010) yang menyatakan bahwa kompetensi dewan komisaris berpengaruh positif pada pengungkapan sukarela.

Faktor lain yang mendasari hipotesis ini diterima mungkin dilihat dari latar belakang pendidikan masing-masing anggota komisaris independen tersebut. Latar belakang pendidikan yang memumpuni membuat pemikiran dan strategi yang baik untuk mengembangkan pola pemikiran antar individu satu dengan yang lainnya. Selain faktor pendidikan tujuan dewan komisaris independen yaitu untuk mendorong suatu keadaan yang lebih baik dan menaruh keseimbangan diantara para kepentingan perusahaan dengan kepentingan *stakeholder*. Dengan adanya kesinambungan antara komisaris independen dengan *stakeholder* maka kerjasama keduanya akan menghasilkan hubungan baik antar pihak internal dan eksternal perusahaan.

b. Pengaruh Jumlah Anggota Dewan Komisaris terhadap Enterprise Risk Management.

Berdasarkan Tabel 16 yang menjelaskan data dari Indonesia tampak bahwa jumlah anggota dewan komisaris memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,057 dengan nilai signifikansi sebesar $0,033 > \alpha (0,05)$. Variabel jumlah anggota dewan komisaris di Indonesia **diterima**.

Berdasarkan Tabel 17 yang menjelaskan data dari Malaysia tampak bahwa nilai koefisien regresi sebesar 0,075 dengan nilai signifikansi sebesar $0,005 > \alpha (0,05)$ Artinya variabel jumlah anggota dewan komisaris di negara Indonesia dan Malaysia **diterima**.

Kedua negara tersebut sama-sama mempunyai berpengaruh positif dan signifikan terhadap luas pengungkapan *enterprise risk management*. Sehingga dapat disimpulkan bahwa jumlah anggota dewan komisaris berpengaruh terhadap luas pengungkapan *enterprise risk management*.

Semakin besar proporsi jumlah anggota dewan komisaris, maka akan meningkatkan kapasitas monitoring dan pemberian informasi serta kualitas pengungkapan manajemen risiko, karena besarnya jumlah anggota dewan komisaris memungkinkan perusahaan tidak didominasi oleh pihak manajemen dalam menjalankan perannya secara lebih efektif (Sulistyaningsih dan Gunawan, 2016). Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Ardiansyah dan Adnan (2014).

c. Pengaruh reputasi auditor terhadap Enterprise Risk Management.

Berdasarkan Tabel 16 menunjukkan reputasi auditor memiliki nilai koefisien regresi sebesar -0,022 dengan nilai signifikansi sebesar $0,369 > \alpha (0,05)$. Artinya variabel reputasi auditor memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap luas pengungkapan *enterprise risk management*. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis tiga ($H3_b$) **ditolak**.

Berdasarkan Tabel 17 menunjukkan reputasi auditor memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,042 dengan nilai signifikansi sebesar $0,005 > \alpha (0,05)$. Artinya variabel reputasi auditor memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap luas pengungkapan *enterprise risk management*. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis tiga ($H3_b$) **diterima**.

Berdasarkan hasil yang di dapat terdapat perbedaan yang mendasari bahwa reputasi auditor yang bergabung dalam *Big Four* belum bisa dikatakan memiliki dampak besar dalam pengungkapan manajemen resiko di masing-masing perusahaan, baik perusahaan manufaktur di Indonesia dan juga Malaysia. Bisa dilihat dalam *annual report* disetiap perusahaan tidak semua perusahaan disetiap tahunnya menggunakan jasa auditor yang bergabung dalam *Big Four*.

d. Pengaruh ukuran perusahaan terhadap Enterprise Risk Management.

Berdasarkan Tabel 16 yang menjelaskan data dari Indonesia tampak bahwa ukuran perusahaan memiliki nilai koefisien regresi sebesar -0,193 dengan nilai signifikansi sebesar $0,192 > \alpha (0,05)$. Berdasarkan tabel 17 yang menjelaskan data dari Malaysia tampak

bahwa nilai koefisien regresi sebesar -0,087 dengan nilai signifikansi sebesar $0,466 > \alpha (0,05)$ artinya variabel ukuran perusahaan di negara Indonesia dan Malaysia pengaruh positif dan signifikan terhadap luas pengungkapan *enterprise risk management*.

Semakin tinggi total aset yang dimiliki suatu perusahaan baik di perusahaan Indonesia dan Malaysia maka semakin tinggi pula pengungkapan risiko manajemennya. Ukuran perusahaan akan mampu mengendalikan dan mengontrol pihak manajemen, sehingga perusahaan dengan skala besar umumnya akan cenderung mengadopsi praktik *corporate governance* dengan lebih baik jika dibandingkan dengan perusahaan kecil.

Hal tersebut dikarenakan semakin besar suatu perusahaan maka semakin tinggi tingkat risiko yang dihadapi seperti risiko keuangan, risiko operasional, risiko reputasi, peraturan dan risiko informasi. Akibatnya pengungkapan manajemen risiko akan lebih tinggi. Perusahaan yang besar akan cenderung melakukan pengungkapan untuk menjaga reputasinya agar tetap mendapatkan kepercayaan dari pihak *stakeholder*. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Sari (2013) dan Kristiono, dkk., (2014).

e. Pengaruh struktur kepemilikan publik terhadap Enterprise Risk Management.

Berdasarkan Tabel 16 menunjukkan struktur kepemilikan publik memiliki nilai koefisien sebesar 0,149 dengan nilai signifikansi sebesar $0,006 < \alpha (0,05)$. Artinya variabel struktur kepemilikan publik memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap luas pengungkapan *enterprise risk management*. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis lima (H5a) **diterima**.

Berdasarkan Tabel 17 menunjukkan struktur kepemilikan publik memiliki nilai koefisien sebesar -0,002 dengan nilai signifikansi sebesar $0,847 > \alpha (0,05)$. Artinya variabel struktur kepemilikan publik memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap luas pengungkapan *enterprise risk management*. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis lima (H5b) **ditolak**.

Kepemilikan perusahaan oleh pihak luar memiliki kekuatan yang besar dalam memengaruhi perusahaan melalui media massa berupa kritikan atau komentar yang semuanya dianggap sebagai suara masyarakat. Adanya konsentrasi kepemilikan publik menimbulkan pengaruh pihak luar sehingga mengubah pengelolaan perusahaan yang pada awalnya berjalan sesuai keinginan manajemen menjadi memiliki keterbatasan (Puspitasari, 2015). Semakin besar porsi saham yang dimiliki publik, maka akan semakin besar tekanan yang diterima perusahaan untuk menyediakan informasi lebih banyak dalam laporan tahunannya yang di dalamnya terdapat pula pengungkapan tentang manajemen risiko.

Hasil penelitian ini sejalan dengan yang dilakukan oleh Diatmika dan Yadyana (2017) dan berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Abdullah dan Ardiansyah (2017) yang menyatakan bahwa kepemilikan saham oleh publik tidak berpengaruh terhadap pengungkapan melalui ERM.

Alasan mendasar dari tertolaknya hipotesis dalam penelitian ini di mungkinkan karena kepemilikan saham yang kepemilikannya dibawah 5% dan sifatnya adalah untuk diperjualbelikan dan bukan untuk pengendalian manajemen. Berdasarkan dari sifat kepemilikan saham yang hanya untuk diperjualbelikan dan bukan untuk digunakan sebagai pengendalian manajemen, kemungkinan secara keseluruhan informasi perusahaan kurang begitu diperhatikan oleh pemegang saham dengan proporsi dibawah 5%. Hal ini mungkin menjadi pertimbangan manajemen perusahaan dalam melakukan penyebaran informasi mengenai laporan keuangan dalam website pribadi perusahaan.

KESIMPULAN

SIMPULAN

Penelitian ini menggunakan data laporan tahunan perusahaan manufaktur yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Bursa Malaysia (BM) periode pengamatan tahun 2015-2017. Variabel dependen yang digunakan ialah *Enterprise Risk Management*

dan variabel independen ialah komisaris independen, jumlah anggota dewan komisaris, reputasi auditor, ukuran perusahaan, dan struktur kepemilikan publik. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda dengan menggunakan *Statistical Package for Social Science (SPSS)* versi 15.0.

Berdasarkan hasil uji hipotesis dan pembahasan, maka diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Komisaris independen berpengaruh negatif terhadap *Enterprise Risk Management* di perusahaan manufaktur di Indonesia.
2. Komisaris independen berpengaruh positif terhadap *Enterprise Risk Management* di perusahaan manufaktur di Malaysia.
3. Jumlah anggota dewan komisaris berpengaruh positif terhadap *Enterprise Risk Management* di Indonesia.
4. Jumlah anggota dewan komisaris berpengaruh positif terhadap *Enterprise Risk Management* di Malaysia.
5. Reputasi auditor berpengaruh negatif terhadap *Enterprise Risk Management* di Indonesia.
6. Reputasi auditor berpengaruh positif terhadap *Enterprise Risk Management* di Malaysia.
7. Ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap *Enterprise Risk Management* di Indonesia.
8. Ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap *Enterprise Risk Management* di Malaysia.
9. Struktur kepemilikan publik berpengaruh positif terhadap *Enterprise Risk Management* di Indonesia.
10. Struktur kepemilikan publik berpengaruh negatif terhadap *Enterprise Risk Management* di Malaysia.

DAFTAR PUSTAKA

- Agista, G. G., Putu, N., & Harta, S. (2017). "Pengaruh Corporate Governance Structure dan Konsentrasi Kepemilikan Pada Pengungkapan Enterprise Risk Management." *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Vol.20.1. Juli (2017): 438-466*, 20(CORPORATE GOVERNANCE STRUCTURE), 438–466.
- Ardiansyah, L. O. M., & Adnan, M. A. (2014). "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Luas Pengungkapan Enterprise Risk Management." *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akutansi*, 23(2), 89–105.
- Dzakawali, M. G., Nazar, M. R., & Yudowati, S. P. (2017). "Risk Management (Studi Kasus Pada Perusahaan Sektor Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Pada Tahun 2013 – 2015)," 4(3), 2597–2604.
- Fathimiyah, V., Zulfikar, R., & Fitriyani, F. (2012). "Pengaruh Struktur Kepemilikan Terhadap Risk Management Disclosure (Studi Survei Industri Perbankan Yang Listing Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2008-2010)." *SNA XV Banjarmasin*, 1–26.
- Firdaus, Haris, A. (2014). *Pengaruh Leverage, Profitabilitas dan Struktur Kepemilikan Publik Terhadap Risk Management Disclosure (Studi Pada Perbankan yang Terdaftar di BEI Tahun 2011)*.
- Halim, E. H., Mustika, G., Sari, R. N., Anugerah, R., & Mohd-Sanusi, Z. (2017). "Corporate Governance Practices and Financial Performance: The Mediating Effect of Risk Management Committee at Manufacturing Firms." *Journal of International Studies*, 10(4), 272–289. <https://doi.org/10.14254/2071-8330.2017/10-4/21>

- Handayani, B. D., & Yanto, H. (2013). "Determinan Pengungkapan Enterprise Risk Managemen." *Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 17(3), 333–342.
- Kanhai, C., & L, G. (2014). "Factors Influencing The Adoption Of Enterprise Risk Management (ERM) Practices By Banks in Zimbabwe." *International Journal of Business and Commerce*, 3(6), 1–17.
- Meizaroh, & Lucyanda, J. (2011). "Pengaruh Corporate Governance dan Konsetrasi Kepemilikan pada Pengungkapan Enterprise Risk Management." *Simposium Nasional Akuntansi Xiv Aceh 2011*, 1–25. <https://doi.org/10.1145/2831296.2831338>
- Prayoga, E. B., & Almilia, L. S. (2013). "Pengaruh Struktur Kepemilikan dan Ukuran Perusahaan terhadap Pengungkapan Manajemen Risiko." *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 4(1), 1–9.
- Utami, I. C. (2015). *Pengaruh Dewan Komisaris, Komite Audit, Internal Audit, Komite Manajemen Resiko, dan Ukuran Perusahaan terhadap Pengungkapan Enterprise Risk Management. Journal of applied microbiology.*
- Wulandari, R. F. (2018). "Pengaruh Mekanisme Corporate Governance dan Struktur Kepemilikan Publik Terhadap Luas Pengungkapan Enterprise Risk Management." *Jurnal Manajemen Teori Dan Terapan*, 1–16. <https://doi.org/10.1016/j.ijheatmasstransfer.2017.09.124>
- <https://www.wartaekonomi.co.id/read145257/ketika-skandal-fraud-akuntansi-menerpa-british-telecom-dan-pwc.html> (diakses tanggal 23 desember 2018)
- <https://livingmba.wordpress.com/2010/08/16/the-social-responsibility-of-business-is-to-increase-its-profits/> (diakses tanggal 25 januari 2018)